

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera

Shofi Yuni Fitri¹, Mike Triani²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: shofyunifitri@gmail.com miketriani@unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

30 Oktober 2025

Disetujui:

1 November 2025

Terbit daring:

2 November 2025

DOI: -

Sitasi:

Fitri Shofi Yuni & Triani, M (2025). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di pulau sumatera.

Abstract:

This study aims to analyze the determinants of income inequality in Sumatra Island. The variables examined consist of GDP per capita, agricultural sector GDP, agricultural employment, school participation rate, open unemployment rate, and female labor force participation across 10 provinces in Sumatra from 2015 to 2022. This research employs panel data analysis, and based on the model selection tests conducted, the Fixed Effect Model (FEM) was identified as the most appropriate model. The results indicate that GDP per capita has a negative and significant effect on income inequality, implying that higher regional income contributes to reducing inequality in Sumatra. Likewise, the school participation rate and female labor force participation show negative and significant effects, suggesting that better access to education and greater involvement of women in the labor market play an essential role in narrowing the income gap. Meanwhile, agricultural employment has a negative but insignificant effect on income inequality, indicating that the agricultural labor sector has not yet contributed meaningfully to reducing inequality. Furthermore, agricultural GDP and the open unemployment rate have positive but insignificant effects, demonstrating that increases in these variables do not have a substantial impact on income distribution. Overall, the findings highlight the importance of economic growth, education, and female workforce participation in addressing income inequality in Sumatra.

Keywords: Income Inequality, GDP per Capita, Agricultural and Female Labor Force, School Participation Rate, Fixed Effect Model (FEM)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Variable yang diteliti adalah PDRB perkapita, PDRB sektor pertanian, tenaga kerja pertanian, angka partisipasi sekolah, tingkat pengangguran terbuka, tenaga kerja perempuan pada 10 provinsi yang ada di pulau sumatera dalam kurun waktu 2015- 2022. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model terbaik yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pdrb perkapita, angka partisipasi sekolah, tenaga kerja perempuan memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau sumatera. Sedangkan untuk variable tenaga kerja sektor pertanian memiliki pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. PDRB sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau sumatera.

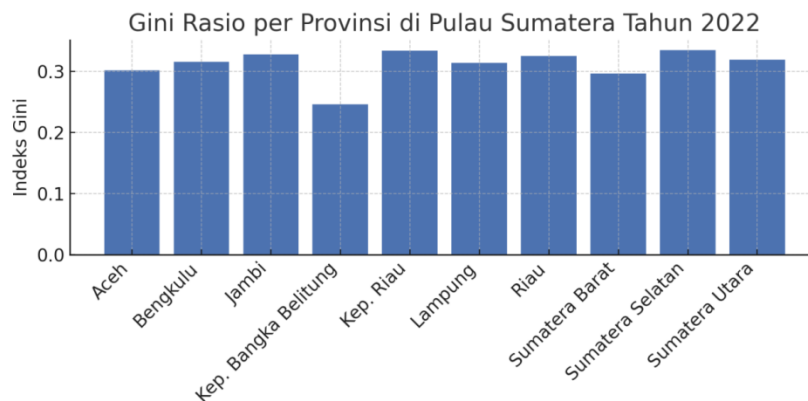
Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, PDRB Per Kapita, Tenaga Kerja Pertanian dan Perempuan, Angka Partisipasi Sekolah, Fixed Effect Model (FEM)

Kode Klasifikasi JEL: D63, I14, I24

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang adalah ketimpangan pendapatan.

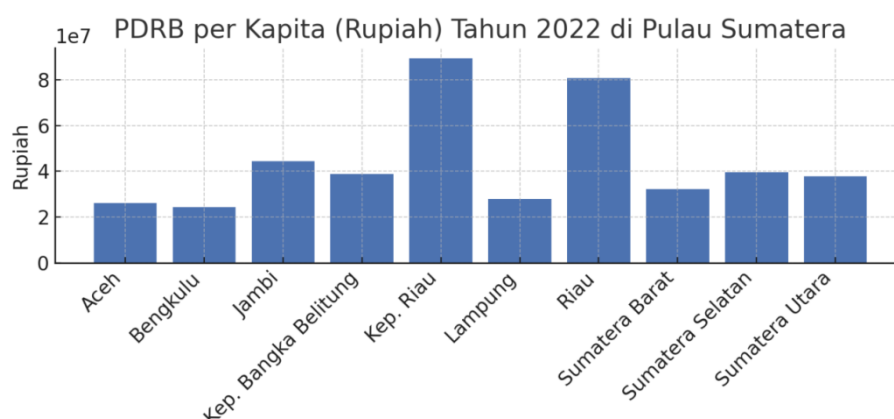
Ketimpangan yang tinggi tidak hanya menimbulkan kesenjangan sosial, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan instabilitas sosial dalam jangka panjang (Todaro & Smith, 2012)



Sumber: Badan Pusat Statistik, (Diolah)

Gambar 1 Gini Rasio Per Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2022

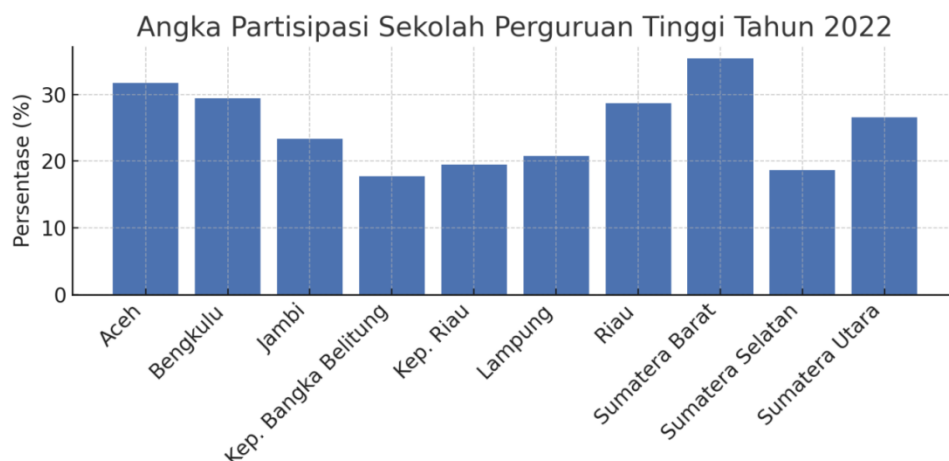
Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa indeks gini Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, tetapi masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah yang cukup lebar. Pulau Sumatera sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar menunjukkan tingkat ketimpangan yang bervariasi antarprovinsi. Berdasarkan data BPS tahun 2015–2022, rata-rata gini rasio Pulau Sumatera menurun dari 0,34 pada tahun 2015 menjadi sekitar 0,31 pada tahun 2022. Meskipun terjadi perbaikan, ketimpangan antarprovinsi masih tinggi. Misalnya, pada tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ketimpangan terendah sebesar 0,2455, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada tingkat 0,3345



Sumber: Badan Pusat Statistik, (Diolah)

Gambar 1 Pdrb Per Kapita Di Pulau Sumatera Tahun 2022

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas harga konstan (dalam rupiah) menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antarprovinsi. Pada tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau mencatat PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp89.612.570, diikuti oleh Riau sebesar Rp80.773.870, sedangkan Bengkulu hanya mencapai Rp24.238.470 dan Aceh sebesar Rp26.061.530. Perbedaan ini mengindikasikan adanya kesenjangan produktivitas ekonomi antarwilayah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, (Diolah)

Gambar 3 Angka Partisipasi Sekolah Perguruan Tinggi Tahun 2022

Faktor sosial juga berperan penting dalam menjelaskan ketimpangan di Sumatera. Angka Partisipasi Sekolah (APS) perguruan tinggi di Pulau Sumatera masih tergolong rendah dan bervariasi antarprovinsi. Pada tahun 2022, Sumatera Barat mencatat APS tertinggi sebesar 35,41%, sementara Kepulauan Bangka Belitung hanya 17,68%. Rendahnya akses pendidikan tinggi di beberapa provinsi membatasi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi



Sumber: Badan Pusat Statistik, (Diolah)

Gambar 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera menunjukkan perbedaan yang cukup lebar. Pada tahun 2022, Kepulauan Riau mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8,23%, sedangkan Bengkulu hanya 3,59%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa penyediaan lapangan kerja belum merata antarprovinsi

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita), tingkat pendidikan, pengangguran, serta partisipasi tenaga kerja perempuan. Meskipun secara rata-rata ketimpangan cenderung menurun, perbedaan antarprovinsi masih cukup besar dan berpotensi menimbulkan kesenjangan kesejahteraan.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita), kontribusi sektor pertanian, tingkat pendidikan, pengangguran, serta partisipasi tenaga kerja perempuan. Meskipun secara rata-rata ketimpangan cenderung menurun, perbedaan antarprovinsi masih cukup besar dan berpotensi menimbulkan kesenjangan kesejahteraan.

sisi penelitian, sebagian besar studi tentang ketimpangan di Indonesia masih berfokus pada level nasional atau Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2021). Sementara itu, kajian mengenai determinan ketimpangan di Pulau Sumatera masih terbatas. Padahal, wilayah ini menyimpan potensi besar sekaligus menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) dari studi ini, yaitu kurangnya kajian empiris yang secara spesifik meneliti hubungan antara faktor ekonomi (PDRB dan PDRB sektor pertanian), tenaga kerja (informal pertanian, pengangguran, partisipasi perempuan), serta angka partisipasi sekolah terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera” untuk periode 2015- 2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan, sekaligus menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di wilayah Sumatera.

METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Sumber data di peroleh melalui publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Periode data yang di gunakan adalah dari tahun 2015-2022 dengan variabel yang diuji adalah ketimpangan pendapatan (Y), PDRB perkapita, PDRB pertanian, tenaga kerja sektor pertanian, angka partisipasi sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan tenaga kerja profesional perempuan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel dengan model yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + e_{it} \quad (1)$$

Dimana Y merupakan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen, β_0 merupakan konstanta, dan β_1 – β_6 merupakan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. X1 merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), X2 merupakan Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian, X3 merupakan tenaga kerja sektor pertanian, X5 merupakan angka partisipasi sekolah, dan X6 merupakan tenaga kerja perempuan. Sementara itu, ϵ merupakan error term yang merepresentasikan variabel-variabel lain di luar model yang turut memengaruhi ketimpangan pendapatan namun tidak diamati atau tidak dimasukkan dalam persamaan regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Panel

Tabel 1 Uji Chow

alat uji	chi-square statistick	probabilitas	keputusan
chow	171.7757772	0.0000	fixed effect model
hasuman	24.924761	0.0004	fixed effect model

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel, uji Chow menunjukkan nilai chi-square sebesar 171.7757772 dengan probabilitas 0.0000. Karena nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0.05, maka H_0 ditolak, sehingga model yang sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, hasil uji Hausman memperlihatkan nilai chi-square sebesar 24.924761 dengan probabilitas 0.0004. Probabilitas yang juga lebih kecil dari 0.05 menegaskan penolakan H_0 , sehingga model yang dipilih tetap Fixed Effect Model. Dengan kata lain, kedua uji statistik tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik khusus antar provinsi sepanjang periode observasi.

Tabel 2 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

variabel	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	1.846.907	0.199326	9.265.775	0.0000
LOG(X1_PDRB)	-0.130686	0.020447	-6.391.411	0.0000
X2_PDRBPertanian	0.000299	0.000267	1.118.369	0.2676
X3_TSP	-0.000396	0.000422	-0.939798	0.3509
X4_APS	-0.002372	0.001090	-2.176.048	0.0332
X5_TPT	0.000295	0.001101	0.267640	0.7898
X6_TKP	-0.001232	0.000538	-2.288.993	0.0254
R-squared	0.915499			
Adjust R-square	0.895694			

F-statistic	4.622.577
Prob F-statistic	0.000000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12, 2025

Hasil dari estimasi dari tabel 1 yang di uji dengan metode *Fixed Effect Model* di dapati persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1.84690703932 - 0.130686238736 * \text{LOG}(X1_PDRB) + 0.000298852210999 * X2_PDRBPertanian - 0.000396184309694 * X3_TSP - 0.00237195657073 * X4_APS + 0.000294626168834 * X5_TPT - 0.00123219200473 * X6_TPEREMPUAN + [CX=F]$$

Hasil estimasi menunjukkan nilai F-statistic sebesar 46,2257 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Ini menandakan bahwa secara simultan seluruh variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga model regresi panel yang digunakan dinilai layak. Nilai R^2 sebesar 0,9155 menunjukkan bahwa 91,55% variasi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatra dapat dijelaskan oleh variabel-variabel penelitian, seperti PDRB, PDRB pertanian, tingkat partisipasi sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan tenaga kerja perempuan. Sisanya sebesar 8,45% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kebijakan ekonomi dan faktor sosial-ekonomi.

Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,8957 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dan derajat kebebasan, model tetap memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Dengan demikian, model regresi ini efektif dalam menjelaskan variasi ketimpangan pendapatan di wilayah penelitian.

Pembahasan

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi PDRB suatu provinsi, maka ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Temuan ini sejalan dengan hipotesis *inverted U curve* yang dikemukakan oleh Kuznets (1955), di mana pada tahap awal pembangunan ekonomi biasanya terjadi peningkatan ketimpangan karena pertumbuhan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Namun, ketika perekonomian memasuki fase yang lebih maju, distribusi hasil pertumbuhan menjadi lebih merata sehingga tingkat ketimpangan berangsur menurun.

Dengan demikian, peningkatan PDRB di wilayah Sumatera berpotensi mendorong perbaikan distribusi pendapatan apabila dibarengi dengan kebijakan yang bersifat pemerataan, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, penciptaan lapangan kerja di sektor formal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Pandangan ini sejalan dengan Firmansyah, (2021) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, melainkan harus diiringi dengan kebijakan distribusi yang inklusif agar efektif dalam menekan ketimpangan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Ummah, (2019) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hidayat, (2020) juga menemukan bahwa peningkatan PDRB suatu daerah erat kaitannya

dengan penurunan ketimpangan, khususnya apabila pertumbuhan di sektor produktif diiringi dengan penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya, studi Mustika et al.,(2023) di Sumatera dan Jawa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB merupakan faktor kunci dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan, terutama ketika diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Hasil serupa ditunjukkan oleh Yuliana, (2022), yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB mampu memperbaiki distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat apabila ditopang oleh kebijakan pembangunan yang menekankan pada pemerataan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa PDRB tidak hanya berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pemerataan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera. Namun demikian, agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada penurunan ketimpangan, diperlukan kebijakan pembangunan yang memastikan hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok berpendapatan tinggi maupun pelaku usaha besar.

2. Pengaruh PDRB Pertanian terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian sebesar 0,000299 dengan nilai probabilitas 0,2676 ($> 0,05$). Artinya, PDRB sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jawa, (2025) yang menyatakan bahwa sektor pertanian terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai produksi atau output ekonomi di sektor pertanian belum mampu secara langsung memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun PDRB sektor pertanian mengalami kenaikan, kondisi tersebut tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh. Peningkatan hasil produksi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, sedangkan petani kecil maupun buruh tani belum merasakan manfaat yang berarti. Akibatnya, ketimpangan pendapatan tetap tidak mengalami perubahan signifikan meskipun PDRB pertanian meningkat.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori dualisme ekonomi Arthur Lewis (1954), yang membagi struktur ekonomi ke dalam dua sektor utama: sektor tradisional (pertanian) dengan produktivitas rendah dan surplus tenaga kerja, serta sektor modern (industri dan jasa) dengan produktivitas tinggi. Peningkatan PDRB di sektor tradisional sering kali hanya menambah output tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan pekerja informal dengan produktivitas marginal yang rendah. Akibatnya, pertumbuhan sektor ini kurang berdampak pada perbaikan distribusi pendapatan.

Hasil serupa juga ditemukan oleh U. Firmansyah et al., (2022) yang menyatakan bahwa PDRB sektor pertanian tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Sumatera selama periode 2015–2019. Ketidaksignifikan tersebut mencerminkan bahwa peningkatan produksi pertanian belum mampu secara optimal meningkatkan kesejahteraan petani.

Namun, terdapat penelitian lain dengan hasil berbeda. Suparman et al., (2024) menemukan bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah pedesaan pada tingkat provinsi di Indonesia. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Putri & Iryani, (2023) yang menemukan bahwa pembangunan sektor pertanian justru berdampak positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi

Sumatera Barat pada periode 2007–2022. Perbedaan hasil tersebut diduga terjadi karena pembangunan sektor pertanian lebih banyak menguntungkan kelompok masyarakat menengah ke atas, seperti pemilik lahan dan distributor, sementara buruh tani yang hanya mengandalkan upah harian belum merasakan manfaat nyata.

Dengan demikian, perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan sangat ditentukan oleh struktur ekonomi, tingkat modernisasi, serta pemerataan distribusi manfaat pertumbuhan. Dalam konteks Pulau Sumatera, pertumbuhan PDRB sektor pertanian belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan karena masih didominasi oleh pekerja informal dan adanya kesenjangan akses terhadap sumber daya produksi.

3. Pengaruh tenaga kerja pertanian

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja informal pertanian memiliki koefisien positif sebesar 0,002056, namun nilai probabilitas sebesar 0,3509 ($> 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Dengan kata lain, meskipun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian informal bertambah, hal ini tidak memberikan dampak nyata dalam memperbaiki atau memperburuk distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Dualitas Ekonomi Lewis (1954), yang menyatakan bahwa sektor tradisional, termasuk pertanian, ditandai dengan surplus tenaga kerja dan produktivitas marginal yang mendekati nol. Oleh karena itu, penambahan tenaga kerja di sektor pertanian informal tidak meningkatkan output secara signifikan, sehingga pendapatan pekerja cenderung stagnan dan kontribusinya terhadap pemerataan pendapatan terbatas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Jawa, (2025) Variabel jumlah pekerja ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa perubahan jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah tidak secara otomatis berdampak pada tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, baik peningkatan maupun penurunan jumlah pekerja tidak secara langsung mampu mengurangi maupun meningkatkan ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan temuan (Akbar et al., 2021) yang meneliti Indonesia pada periode 2011–2019. Hasil analisis regresi mereka menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti semakin besar proporsi pekerja di sektor pertanian, semakin menurun tingkat ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan temuan tersebut, tidak signifikkannya pengaruh tenaga kerja informal pertanian di Pulau Sumatera dapat dipahami karena beberapa faktor, yaitu dominasi pekerjaan informal dengan produktivitas rendah, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta pola distribusi keuntungan sektor pertanian yang lebih terpusat pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, transformasi tenaga kerja dari sektor informal menuju sektor formal dan modernisasi sektor pertanian menjadi strategi penting agar pertumbuhan sektor pertanian dapat benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

4. Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) memiliki koefisien negatif sebesar $-0,000396$ dengan nilai probabilitas 0,0332 ($< 0,05$). Hal ini berarti APS berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, di mana peningkatan APS cenderung menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Temuan ini

sejalan dengan Teori Human Capital Michael P. Todaro & Smith, (2015), yang menegaskan bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sehingga memberikan peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi. Dengan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses pendidikan, terutama kelompok menengah ke bawah, distribusi pendapatan menjadi lebih merata karena mobilitas sosial meningkat dan pekerja memiliki kesempatan untuk keluar dari pekerjaan informal dengan produktivitas rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Mustika et al., (2023) di Pulau Sumatera dan Jawa, yang menyatakan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan akses pendidikan berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Demikian pula Istikhroh et al., (2020) di Yogyakarta menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam memperkecil ketimpangan karena pendidikan membuka akses terhadap lapangan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik. Signifikansi temuan ini dapat dijelaskan karena pendidikan di Pulau Sumatera berperan cukup besar dalam mendorong mobilitas tenaga kerja, terutama dari sektor informal ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi, sehingga efek penurunan ketimpangan lebih terasa dibandingkan di wilayah lain. Selain itu, adanya dukungan kebijakan pemerataan akses pendidikan dan variasi angka partisipasi sekolah antarprovinsi di Sumatera juga memperkuat pengaruh signifikan tersebut.

Namun demikian, terdapat penelitian yang menghasilkan temuan berbeda. Laila et al., (2024) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah, yang merupakan indikator pendidikan, berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2010–2019. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan tidak selalu secara langsung menurunkan ketimpangan apabila kualitas pendidikan belum merata. Penelitian Effendy, (2019) juga menegaskan bahwa meskipun pendidikan berperan penting dalam jangka panjang, pada beberapa wilayah dan periode tertentu dampaknya tidak selalu konsisten terhadap ketimpangan pendapatan. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh pendidikan, termasuk APS, sangat bergantung pada kualitas pendidikan, kebijakan pemerataan, serta kondisi struktural ekonomi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa APS berperan signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Akan tetapi, efektivitas pendidikan dalam mengurangi ketimpangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kuantitas partisipasi sekolah, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang diberikan, kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, serta pemerataan akses di seluruh lapisan masyarakat.

5. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di pulau sumatera

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki koefisien positif sebesar 0,000295 dengan nilai probabilitas 0,7898 ($> 0,05$). Artinya, meskipun arah hubungan TPT terhadap ketimpangan pendapatan bersifat positif, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, kenaikan angka pengangguran terbuka tidak serta-merta berimplikasi pada perubahan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera.

Secara teori, Keynes (1936) menjelaskan bahwa pengangguran terjadi akibat lemahnya permintaan agregat yang menurunkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, peningkatan pengangguran seharusnya memperlebar kesenjangan pendapatan. Namun, di wilayah dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal seperti Pulau Sumatera, hubungan tersebut menjadi lemah. Banyak individu yang tidak bekerja secara formal tetap memperoleh penghasilan dari aktivitas informal, meskipun

dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Akibatnya, fluktuasi angka pengangguran formal tidak banyak memengaruhi distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dias & Indrawati, (2021) yang menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Barat pada periode 2015–2020. Penelitian Mustika et al., (2023) juga mendukung hasil tersebut dengan temuan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, meskipun memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa pengangguran lebih relevan digunakan sebagai indikator kemiskinan dibandingkan ketimpangan, karena distribusi pendapatan lebih dipengaruhi oleh perbedaan penghasilan antar kelompok pekerja.

Selain itu, Alrakhman, (2022) juga menemukan bahwa hubungan antara pengangguran dan ketimpangan di kabupaten/kota di Sumatera selama periode 2011–2020 tidak signifikan. Besarnya proporsi pekerja di sektor informal dinilai sebagai faktor utama yang melemahkan pengaruh TPT terhadap distribusi pendapatan di wilayah ini.

Berbeda dengan hasil tersebut, penelitian Yoertiara & Feriyanto, (2022) terhadap provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pasar tenaga kerja di Jawa yang lebih formal dan kompetitif, sehingga perubahan angka pengangguran lebih cepat tercermin dalam distribusi pendapatan. Sejalan dengan itu, Rahayu, (2020) juga menemukan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Jawa Barat, di mana dominasi sektor formal membuat kenaikan angka pengangguran menyebabkan banyak rumah tangga kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga memperburuk distribusi pendapatan.

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidaksignifikanan pengaruh TPT terhadap ketimpangan di Pulau Sumatera disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, dominasi pekerja informal membuat angka TPT kurang merepresentasikan kondisi sebenarnya dari distribusi pendapatan. Kedua, TPT lebih erat kaitannya dengan masalah kemiskinan dibandingkan ketimpangan. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengurangi ketimpangan di Sumatera tidak hanya perlu berfokus pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas pekerjaan di sektor informal agar sektor ini mampu berkontribusi lebih besar terhadap pemerataan pendapatan.

6. Pengaruh Tenaga Kerja Perempuan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Variabel tenaga kerja perempuan memiliki koefisien negatif (-0,001232) dan signifikan (p -value $0,0254 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang bekerja, maka ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Partisipasi perempuan dalam pasar kerja membantu memperluas basis pendapatan rumah tangga, sehingga mendorong pemerataan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori *human capital* yang menekankan bahwa pendidikan dan keterampilan menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Becker, 1993). Perempuan yang terlibat dalam sektor kerja profesional umumnya memiliki tingkat upah yang lebih baik dan relatif stabil, sehingga pendapatan yang diperoleh mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sekaligus mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Setyadharma (2021) yang membuktikan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan secara signifikan menurunkan ketimpangan di tingkat nasional.

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Badriah & Istiqomah, (2022), yang menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender dalam partisipasi kerja berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.

Sementara itu, studi di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan, yang erat kaitannya dengan perbaikan distribusi pendapatan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan di sektor profesional terbukti menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Sumatera

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model Fixed Effect, penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi tenaga kerja perempuan. PDRB, angka partisipasi sekolah, dan tenaga kerja perempuan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, dan keterlibatan perempuan di pasar kerja, semakin rendah tingkat ketimpangan. Sementara itu, PDRB sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian, dan tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menandakan kontribusi sektor pertanian dan dinamika pengangguran belum mampu memengaruhi pemerataan pendapatan secara nyata selama periode penelitian.

Secara umum, hasil penelitian ini konsisten dengan tujuan dan rumusan masalah, serta memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inklusi tenaga kerja perempuan menjadi kunci penting dalam menekan ketimpangan. Kelebihan penelitian ada pada penggunaan data panel lintas provinsi dan waktu, namun penelitian ini masih terbatas pada variabel ekonomi makro dan belum mempertimbangkan faktor struktural lainnya. Ke depan, penelitian dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel seperti distribusi aset, kualitas infrastruktur, serta akses teknologi agar analisis lebih komprehensif. Temuan ini mengarahkan rekomendasi agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan produktivitas sektor pertanian berbasis petani kecil demi menurunkan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, U. U., Sari, Y. P., Yeni, I., Adry, M. R., & Putri, D. Z. (2021). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia: (Studi Data Panel Pertumbuhan Sektor Pertanian). *Education and Development*, 9(4), 421–425.
- Alрахman, D. (2022). *ANALISIS KETIMPANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA* [Sriwijaya University]. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/74547>
- Badriah, L. S., & Istiqomah, I. (2022). Does Gender Inequality Lead to Income Inequality? Evidence From Indonesia. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v17i1.4003>
- Dias, W., & Indrawati, L. R. (2021). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 95–104. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i2.268>
- Effendy, A. B. (2019). *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode Tahun 2011 - 2017* [Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/174178>
- Firmansyah, M. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan Dan Lingkungan Di Jawa Barat Periode 2010-2019. *Jambura Economic Education Journal*, 3(1), 8–27. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i1.8292>
- Firmansyah, U., Junaidi, J., & Achmad, E. (2022). Pengaruh nilai tukar petani, indeks

- pembangunan manusia dan PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 9–14. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.16777>
- Hidayat, R. Al. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2), 153–169. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i2.1123>
- Istikhroh, I., Juliprijanto, W., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -2018. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 2(1), 109–125. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1399>
- Jawa, P. (2025). *Analysis of the determinants of income inequality in java island province 2018-2023 analisis determinan ketimpangan pendapatan provinsi pulau jawa 2018-2023*. 8, 5055–5068.
- Laila, N. N., Dai, S. I. S., & Canon, S. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 59–68. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23438>
- Michael P. Todaro, & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson Education Limited.
- Mustika, C., Nurjanah, R., & Wulan, S. K. (2023). Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1533. <https://doi.org/10.29210/o20231686>
- Putri, M., & Iryani, N. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Gorontalo Development Review (GOLDER)*, 6(2), 98–109.
- Rahayu, D. (2020). Produktivitas pertanian dan ketimpangan pendapatan di Indonesia: Analisis antarwilayah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 75–89.
- Suparman, S., Sutomo, M., Anwar, C., & Olilingo, F. Z. (2024). Impact of the Agricultural Sector on Unemployment, Inequality and Rural Poverty: A Panel Regression Analysis in Indonesian Provinces. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 250–256. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16305>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>
- Yuliana, S. (2022). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia: Perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 33–47.